



**ANALISIS COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN
PARIWISATA PANTAI DEWA RUCI JATIMALANG KECAMATAN
PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO**

Oleh :

Falda Wisnu Ardiansyah, Hartuti Purnaweni, Budi Puspo Priyadi

Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, S. H., Tembalang, Kota Semarang, Kode Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman : <http://fisip.undip.ac.id> Email : fisip@undip.ac.id

Abstrak

Collaborative governance merupakan konsep kerjasama antar pemangku kepentingan yang dapat meningkatkan efektivitas pengembangan pariwisata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan *collaborative governance* dan mengkaji kriteria keberhasilan *collaborative governance* dalam pengembangan pariwisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah model *collaborative governance* Ansell dan Gash serta teori Edward DeSeve. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Subjek penelitian ini adalah para pemangku kepentingan, yang informasi diambil dengan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat aktor dalam kolaborasi pengembangan pariwisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang, yaitu Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo, Pemerintah Desa Jatimalang, Kelompok Sadar Wisata Dewa Ruci dan swasta/pelaku usaha kuliner. Kondisi awal dan kepemimpinan dalam kolaborasi pengembangan pariwisata sudah berjalan dengan baik, tetapi masih terdapat banyak masalah terkait desain institusional dan dalam proses kolaboratif yang menunjukkan permasalahan pada komitmen yang kurang kuat dan pemahaman bersama para pemangku kepentingan yang masih lemah. Kriteria keberhasilan dalam kolaborasi pengembangan pariwisata, yakni *network structure*, *trust to the among participants*, *distributive accountability*, *information sharing* dan *aces to ressource*, sedangkan yang bukan kriteria keberhasilan, yaitu *commitment to a common purpose*, *governance* dan *aces to authority*.

Kata Kunci : Collaborative governance, Pemangku Kepentingan, Pengembangan Pariwisata

Abstract

Collaborative governance is a concept of cooperation between stakeholders that can increase the effectiveness of tourism development. This study aims to analyze the implementation of collaborative governance and examine the success criteria of collaborative governance in developing tourism at Dewa Ruci Jatimalang Beach, Purwodadi District, Purworejo Regency. The theory used in this study is Ansell and Gash's collaborative governance model and Edward DeSeve's theory. This research uses descriptive qualitative method. The subject of this research is stakeholders, from whom information was collected using purposive sampling and snowball sampling techniques. Data collection was carried out through in-depth interviews, observation and documentation studies. The analysis technique used is data reduction, data presentation and conclusion. The results showed that there were four actors in the collaborative development of Jatimalang Dewa Ruci Beach tourism, namely the Youth, Sports and Tourism Office of Purworejo Regency, the Jatimalang Village Government, the Dewa Ruci Tourism Awareness Group and the private sector/culinary entrepreneurs. The initial conditions and leadership in tourism development collaboration have gone well, but there are still many problems related to institutional design and in collaborative processes indicating problems in a lack of strong commitment and shared understanding of stakeholders that is still weak. The criteria for success in tourism development collaboration are network structure, trust to the among participants, distributive accountability, information sharing and access to resources, while those that are not success criteria are commitment to a common purpose, governance and access to authority.

Keywords : Collaborative governance, Stakeholders, Tourism Development

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan banyak keindahan alam. Flora, fauna dan multikulturalisme yang ada membuat Indonesia semakin unik. Potensi yang begitu besar mempengaruhi keberagaman pariwisata di Indonesia. Pariwisata adalah salah satu sektor industri terbesar di tingkat global yang saling berhubungan dengan semua sektor kehidupan lainnya, yakni ekonomi, sosial, budaya, lingkungan dan politik. Jika manajemen diterapkan dengan baik, industri pariwisata memiliki potensi untuk meningkatkan dan mendorong pembangunan, membuka peluang usaha baru, menciptakan peluang kesempatan kerja dan meningkatkan sumber pendapatan masyarakat maupun pemasukan daerah.

Unsur-unsur pariwisata menurut Kurniawan (dalam Motos, dkk., 2015) adalah atraksi, transportasi, akomodasi, fasilitas dan infrastruktur yang masih merupakan bagian dari aktivitas pariwisata. Industri sektor pariwisata menjadi sumber utama devisa negara karena Indonesia memiliki berbagai jenis pariwisata yang tersebar di setiap daerah dan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan, seperti wisata alam, wisata sosial maupun wisata budaya (Mashudi & Fauziah, 2019).

Otonomi daerah yang diatur dalam Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang didalamnya terdapat pemberian kesempatan yang seluas-luasnya kepada daerah oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan inovasi guna membangun

daerahnya. Undang-undang tersebut membawa pengaruh terhadap peningkatan tanggung jawab dan tuntutan untuk mengeksplorasi serta mengoptimalkan potensi-potensi sumber daya, khususnya sumber daya pariwisata yang dimiliki setiap wilayah dalam rangka mendukung proses pembangunan di daerah.

Indonesia merupakan negara kepulauan sehingga pariwisata sektor bahari tersebar di seluruh pulau Indonesia. Nurisyah (dalam Rif'an, 2018) mengungkapkan mengenai wisata bahari yang merupakan bentuk pariwisata dengan mengoptimalkan dan memanfaatkan potensi lingkungan pesisir dan laut, baik melalui aktivitas langsung, seperti memancing, berenang dan menyelam maupun melalui aktivitas tidak langsung, seperti menikmati pemandangan dan suasana laut. Indonesia memiliki potensi yang besar dalam sektor pariwisata pantai dan menjadi pendukung kegiatan ekonomi dalam menunjang pendapatan negara.

Salah satu provinsi yang menawarkan wisata yang beragam adalah Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah memiliki luas 34.548 km² atau sekitar 28,94% dari luas Pulau Jawa (Mustofa dan Haryati, 2018). Jawa Tengah memiliki potensi pariwisata yang beragam jenis, khususnya potensi dalam pengembangan sektor pariwisata pantai yang ada di pantai utara (pantura) dan pantai selatan (pansel). Salah satu daerah di bagian selatan Jawa Tengah memiliki potensi pariwisata pantai yang sangat menarik, yakni Kabupaten Purworejo.

Kabupaten Purworejo merupakan kabupaten yang berada di wilayah administratif Provinsi Jawa Tengah bagian selatan. Keunikan pantai di Kabupaten Purworejo terletak pada garis pantai yang membentang dari timur ke barat dengan jenis tanah berpasir

kehitam-hitaman. Salah satu pariwisata pantai yang potensial di Kabupaten Purworejo adalah Pantai Dewa Ruci Jatimalang.

Pantai Dewa Ruci Jatimalang memiliki kondisi pantai yang baik dengan pemandangan yang indah. Pantai Dewa Ruci Jatimalang merupakan salah satu dari 4 prioritas yang di-*branding* akan dua hal, yakni kuliner dan tempat penyelenggaraan *event* skala nasional (diakses pada 4 Januari melalui <https://setda.purworejokab.go.id>). Salah satu fokus pengembangan pariwisata Kabupaten Purworejo dalam RPJMD 2021-2026 adalah rencana implementasi pengembangan destinasi pariwisata berkelas internasional di Pantai Dewa Ruci Jatimalang. Pantai Dewa Ruci Jatimalang yang berada di Kecamatan Purwodadi merupakan salah satu pantai yang memiliki potensi bahari. Pada 2001-2005 dilaksanakan pembangunan kawasan Kabupaten Purworejo dalam proyek *masterplan* yang disebut Kawasan Bahari Terpadu (KBT) (Yovita, dkk., 2015).. Dalam hal ini, Pantai Dewa Ruci merupakan perwujudan dari pembangunan sektor wisata bahari di Pantai Selatan Pulau Jawa dalam program KBT.

Pantai Dewa Ruci yang terletak di Desa Jatimalang nampak memiliki masalah sebagai daerah tujuan wisata. Pengembangan kawasan pariwisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang belum terlaksana dengan baik yang tercermin dari infrastruktur pendukung pariwisata yang belum memadai serta dukungan aktivitas masyarakat terhadap sektor pariwisata yang masih minim (Setiawan, 2015). Selain itu, pengembangan pariwisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang masih menemui berbagai tantangan dalam pelaksanaannya, terutama minimnya transportasi umum untuk mendukung akses menuju objek wisata, keterbatasan sumber daya dalam

pengembangan pariwisata. Kegiatan promosi dengan pemanfaatan teknologi masih belum dilakukan karena masyarakat belum bisa memanfaatkan media sosial atau *website* secara berkelanjutan. Komunikasi antara pedagang, masyarakat dan pemerintah tentang pentingnya menjaga lingkungan serta pemanfaatan pengelolaan pariwisata berkelanjutan masih kurang efektif sehingga kesadaran masyarakat akan pengembangan dan pengelolaan pariwisata masih rendah (Yovita, dkk., 2015). Kunjungan wisatawan lokal maupun wisatawan asing pada Pantai Dewa Ruci Jatimalang dapat dilihat pada Tabel 1, berikut informasi mengenai data kunjungan wisatawan pada pariwisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang :

Tabel 1
Data Kunjungan Wisatawan
Pariwisata Pantai Dewa Ruci
Jatimalang Tahun 2016-2021

Tahun	Wisatawan Asing	Wisatawan Lokal	Jumlah
2016	-	156.230	156.230
2017	7	132.757	132.764
2018	32	144.998	145.030
2019	-	143.400	143.400
2020	21	181.564	181.585
2021	-	166.956	166.956

Sumber : Dinas Kepemudaan, olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo

Keputusan masyarakat dalam melakukan perjalanan wisata bermula dari keinginan untuk mengapresiasi keindahan suatu objek pariwisata sehingga industri pariwisata harus dikelola dan dikembangkan bersama-sama

oleh berbagai pihak atau bersifat *collaborative governance*. *Collaborative governance* menurut Ansell and Gash (dalam Arrozaaq, 2016) merupakan model baru dari strategi pemerintah yang memungkinkan berbagai pemangku kepentingan atau *stakeholders* untuk bekerja sama dalam satu forum dan bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang tidak dapat dihadapi oleh pemerintah. Konsep tata kelola kolaboratif merupakan suatu alternatif yang dianggap mampu mempercepat dan mengimplementasikan pengembangan kawasan pariwisata.

Berbagai pemangku kepentingan seharusnya melakukan kerja sama melalui tahapan-tahapan kolaborasi dalam rangka mencapai tujuan pengembangan pariwisata yang baik di kawasan Pantai Dewa Ruci Jatimalang. Terlebih di era globalisasi saat ini, daerah harus mampu bersaing untuk memikat wisatawan, investor, dan pemangku kepentingan lain guna meningkatkan pendapatan asli daerah (Santoso & Djumiarti, 2020). Berdasarkan penelitian sebelumnya tentang kolaborasi dalam pengembangan pariwisata oleh Sinaga (2021) menjelaskan mengenai pengembangan pariwisata dibutuhkan pengelolaan kolaboratif karena pariwisata memiliki karakteristik multidimensi. Penelitian yang dilakukan oleh Syahputra (2020) di Pantai Serang Kabupaten Blitar juga menjelaskan bahwa dengan *collaborative governance* dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi dalam proses pengembangan pariwisata. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Silayar (2021) tentang kolaborasi dalam pengembangan pariwisata di Kepulauan Sula. Belum terdapat penelitian tentang *collaborative governance* pada Pantai Dewa Ruci Jatimalang ini, melainkan baru terdapat

penelitian tentang pengembangan potensi wisata bahari dan optimalisasi wisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menghasilkan data dalam bentuk deskriptif seperti, tulisan dan tingkah laku subjek yang diamati. Metode penilitan kualitatif menggambarkan kondisi riil dengan menekankan pada pemaparan hasil temuan di lapangan dan menganalisis secara mendalam. Situs penelitian ini di Pantai Dewa Ruci Jatimalang, Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo. Penentuan informan dalam penelitian ini dengan teknik purposive sampling dan *snowball sampling*. Sumber data yang digunakan, yakni data primer dengan wawancara langsung terhadap informan dan observasi sedangkan data sekunder yang diperoleh dari jurnal, hasil penelitian terdahulu. Analisis dan interpretasi data menggunakan analisis data kualitatif dengan beberapa tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang menggunakan triangulasi sumber dalam pengujian kualitas data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Collaborative governance dalam Pengembangan Pariwisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang

Collaborative governance menurut Ansell dan Gash (dalam Astuti, dkk., 2020:134) merupakan suatu metode pengelolaan pemerintah dengan melibatkan secara langsung pemangku kepentingan di luar instansi pemerintah, yang memiliki orientasi musyawarah dan kesepakatan bersama dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan tujuan implementasi program dan kebijakan publik. *Collaborative governance* yang ada dalam

pengembangan pariwisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang melibatkan beberapa aktor, antara lain Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo, Pemerintah Desa Jatimalang, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dewa Ruci dan swasta atau pelaku usaha kuliner. Ansell dan Gash mengungkapkan bahwa *collaborative governance* terdapat empat aspek, yaitu kondisi awal, kepemimpinan, desain kelembagaan dan proses kolaboratif (Astuti, dkk., 2020:76).

1. Kondisi Awal

Kondisi awal *collaborative governance* didukung oleh potensi wisata yang ada di Pantai Dewa Ruci Jatimalang. Seluruh pemangku kepentingan menyadari bahwa pekerjaan dalam pengembangan pariwisata khususnya Pantai Dewa Ruci Jatimalang tidak dapat dilakukan sendiri sehingga membutuhkan kerja sama atau kolaborasi dari berbagai pihak. Pantai Dewa Ruci Jatimalang memiliki potensi sumber daya alam untuk dikembangkan, sedangkan Dinporapar memiliki pengetahuan yang cukup untuk diberikan kepada masyarakat terkait pengembangan pariwisata. Oleh karena itu, para pemangku kepentingan berkolaborasi untuk saling melengkapi dan mencapai tujuan bersama.

2. Kepemimpinan

Kepemimpinan dalam *collaborative governance* pengembangan pariwisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo. Aspek pemberdayaan atau upaya memberikan bimbingan kepada para pemangku kepentingan sudah dilaksanakan oleh Dinporapar berupa pelatihan kebersihan lingkungan, sanitasi dan pengelolaan sampah yang bertujuan untuk memaksimalkan potensi kuliner *seafood* sebagai komoditi unggulan yang

menarik wisatawan, pentingnya kebersihan objek wisata, sanitasinya serta pengelolaan sampah. Selain itu, perhatian pemerintah dalam pengembangan pariwisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang juga ditunjukkan dengan pelatihan manajemen pokdarwis Pelatihan tentang kuliner juga memberikan ilmu dalam menjalankan usaha kuliner agar makanan yang disajikan terjamin dan kebersihan lingkungan terjaga.

3. Desain Kelembagaan

Penetapan aturan dasar dalam bekerja sama dengan berbagai pihak diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 tahun 2009 dan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2019 tentang Desa Wisata yang menjadi dasar dalam pendampingan dan kerja sama pengembangan pariwisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang. Sementara itu, aturan dasar dalam pengembangan Pariwisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jarak Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo. Artinya, kolaborasi dalam pengembangan pariwisata yang ada di Pantai Dewa Ruci

4. Proses Kolaboratif

a. Dialog Tatap Muka

Dialog tatap muka pelaksanaan *collaborative governance* pengembangan pariwisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang ini sudah berjalan dengan forum-forum musyawarah ketika akan dilaksanakan kegiatan dan juga sudah dilakukan pertemuan informal. Pelaksanaan forum musyawarah ini dihadiri oleh pemerintah desa, pokdarwis dan perwakilan pelaku usaha. Tetapi, pertemuan yang dilaksanakan secara kondisional dan situasional tersebut menyebabkan komunikasi dan

koordinasi yang buruk antar pemangku kepentingan. .

b. Membangun Kepercayaan

Membangun kepercayaan dalam proses kolaboratif yang dilakukan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo, Pemerintah Desa Jatimalang, Pokdarwis Dewa Ruci dan swasta/ pelaku usaha kuliner sudah berjalan cukup baik dibuktikan dengan keterlibatan semua pihak dalam upaya penyelesaian masalah yang dihadapi dan pengembangan kawasan Pantai Dewa Ruci Jatimalang. Proses membangun kepercayaan juga dibuktikan dengan keseriusan dan aksi nyata dari pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan pariwisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang. Misalnya, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dalam membangun, memberikan pelatihan dan memberkan saran kepada pihak-pihak lain untuk kemajuan pariwisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang.

c. Komitmen dalam Proses Kolaborasi

Komitmen para pemangku kepentingan dalam kolaborasi pengembangan pariwisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang masih kurang kuat dan pelaksanaan di lapangan harus lebih ditingkatkan. Proses membangun komitmen tersebut membutuhkan waktu dan usaha yang lebih. Masyarakat sekitar Pantai Dewa Ruci Jatimalang sangat mendukung dalam setiap kegiatan yang diadakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo. Masyarakat selalu dilibatkan dalam pengamanan dan menciptakan kenyamanan bagi wisatawan. Pokdarwis Dewa Ruci menyatakan memiliki komitmen yang kuat. Namun, memang dalam

pelaksanaannya komitmen pokdarwis terutama dalam penataan parkir penerapannya masih jauh dari harapan. Pokdarwis sebagai pengelola kawasan parkir masih mengarahkan parkir ke lokasi-lokasi yang sebenarnya sudah diberikan tanda larangan parkir.

d. Pemahaman Bersama

Pemahaman bersama dalam pengembangan Pantai Dewa Ruci Jatimalang adalah semua pihak ingin memajukan pariwisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang. Pemahaman bersama sangat diperlukan dalam proses pencapaian tujuan bersama karena pemahaman bersama yang kurang maksimal dapat memunculkan masalah-masalah baru di kemudian hari. Upaya penataan dan *rebranding* kawasan pantai harus melibatkan semua pihak, yaitu pemerintah desa, pokdarwis dan pelaku usaha. Selain itu, juga terdapat permasalahan mengenai relokasi pelaku usaha di sini karena kios atau plaza kuliner yang dibangun oleh pemerintah tidak sesuai dengan jumlah pelaku usaha yang saat ini. Proses relokasi harus memberikan pemahaman yang kuat mengenai manfaat-manfaat yang akan diperoleh ataupun manfaat yang akan diberikan untuk kemajuan kawasan pantai.

e. Hasil Sementara

Proses kolaboratif dalam pengembangan pariwisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang ini akan terus dilakukan. Hasil sementara yang dapat dilihat dari pengembangan pariwisata di sini adalah adanya pembangunan gazebo, pembangunan plaza kuliner, pembangunan jogging track, tempat sampah dan *Early Warning System* (EWS). Rencana strategis dalam pengembangan pariwisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo

nomor 11 tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Purworejo tahun 2021-2026.

Pembangunan di kawasan Pantai Dewa Ruci Jatimalang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dan dikelola oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dewa Ruci. Tetapi, dalam pengelolaannya masih belum optimal karena masih banyak fasilitas-fasilitas yang tidak terawat dengan baik, khususnya pada fasilitas yang jauh dari akses jalan utama pantai, yakni panggung kesenian. Hasil sementara yang terlihat dalam kolaborasi pengembangan pariwisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang dapat membantu evaluasi pelaksanaannya sehingga dapat meningkatkan efektivitas program-program dan kegiatan-kegiatan di masa yang akan datang.

B. Kriteria Keberhasilan Collaborative Governance dalam Pengembangan Pariwisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang

1. Network Structure

Network Structure dalam pengembangan pariwisata sudah terlaksana dengan baik. Pembentukan struktur jaringan kolaborasi bersifat kondisional yang dilaksanakan ketika akan dilaksanakan kegiatan-kegiatan besar atau terdapat kepentingan-kepentingan tertentu. Pelaksanaan forum diskusi telah melibatkan semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan pariwisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang, tinggal Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo melakukan upaya untuk melakukan pertemuan ataupun musyawarah yang terjadwal agar pengembangan pariwisata Pantai Dewa Ruci dapat dievaluasi secara bertahap.

2. *Commitment to a common purpose*

Komitmen dalam pencapaian tujuan antar pihak-pihak yang terlibat dalam upaya pengembangan pariwisata ini harus dilakukan oleh pemegang kekuasaan yang dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo. Komitmen para pemangku kepentingan dalam kolaborasi antara para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan pariwisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang belum cukup kuat. Aktor-aktor yang terlibat dalam pengembangan pariwisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang masih perlu meningkatkan komitmen dan implementasi di lapangan terkait tujuan-tujuan pengembangan pariwisata sehingga menciptakan pariwisata yang berkelanjutan.

3. *Trust among the participants*

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo berupaya membangun rasa percaya dari pemerintah desa dan pokdarwis dengan memberikan ruang diskusi terkait permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan pariwisata. Pemerintah Desa Jatimalang dan Pokdarwis Dewa Ruci memiliki kepercayaan terhadap Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo mengikuti arahan dari dinas untuk pelaksanaan diskusi atau musyawarah. Pemerintah desa dan pokdarwis memberikan kepercayaan kepada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo dalam melakukan pemungutan retribusi tiket masuk sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku. Kepercayaan antar pemangku kepentingan menjadi sangat penting dalam proses kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama.

4. *Governance*

Kejelasan tata kelola dalam kegiatan promosi adalah sudah dilaksanakan beberapa pemangku kepentingan. Kegiatan promosi bermanfaat untuk perkembangan pariwisata sehingga semakin banyak diminati oleh wisatawan, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Upaya dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata adalah setiap tahunnya melakukan pelatihan pemasaran kepada seluruh pengelola desa wisata yang ada, tetapi dalam penerapan ilmunya masih jauh dari kata maksimal. Selain memberikan pelatihan, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo juga membantu kegiatan pemasaran pariwisata dengan mengadakan kegiatan atau *event* di daerah destinasi wisata.

5. *Acces to authority*

Akses terhadap kekuasaan ini belum dilaksanakan dengan optimal oleh pemerintah. Hal ini ditunjukkan dengan forum-forum musyawarah atau pertemuan dengan masyarakat yang belum rutin menyebabkan kesulitan bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi dan keluhannya. Keluhan-keluhan dari masyarakat cenderung disampaikan kepada Pemerintah Desa Jatimalang dengan harapan disampaikan kepada dinas terkait dan pemerintah daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo telah berupaya memberikan ruang pengaduan melalui *website* Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo (<https://purworejokab.go.id>) tetapi kemampuan masyarakat dalam mengakses ruang tersebut masih sangat minim.

6. *Distributive accountability*

Pembagian peran dan tanggung jawab atau *distributive accountability* dalam kolaborasi pengembangan pariwisata di

Pantai Dewa Ruci Jatimalang telah terdapat pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan. Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata memiliki peran dalam melakukan pembangunan, kegiatan promosi, pembinaan dan pelatihan kepada pelaku usaha serta melakukan pemungutan retribusi pariwisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang.

Pemerintah Desa Jatimalang memiliki peran dalam memantau dan memberikan usulan terkait kekurangan-kekurangan dalam pariwisata. Para pelaku usaha kuliner memiliki komitmen dalam memberikan kenyamanan kepada para wisatawan untuk tetap bisa menikmati pemandangan dengan sajian kuliner maupun makanan ringan. Pokdarwis memiliki peran dalam membantu pengelolaan pariwisata, pengelolaan infrastruktur, pengelolaan parkir kendaraan pengunjung, terlibat dalam *event-event* dan pengamanan. Pembagian peran dan tanggung jawab semua pemangku kepentingan yang saling berkesinambungan dapat mempermudah dalam pencapaian tujuan bersama dalam pengembangan pariwisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang.

7. Information sharing

Dalam aspek keterbukaan informasi antara pemangku kepentingan sudah saling bertukar informasi atau data, baik dalam forum musyawarah maupun ketika data tersebut dibutuhkan. Ketika Pemerintah desa maupun pokdarwis membutuhkan suatu data informasi mengenai data kunjungan jumlah wisatawan, penerimaan atau yang lainnya tinggal meminta kepada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata juga memiliki situs website maupun instagram yang berisi informasi-informasi pariwisata dan dapat diakses semua pihak kapanpun dan di manapun.

Akan tetapi, dalam aspek keterbukaan informasi pembagian hasil retribusi masuk wisata masih tidak jelas semenjak dicabutnya Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2012.

8. Acces to resources

Sumber daya manusia dalam kolaborasi pengembangan pariwisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang dari setiap pemangku kepentingan sudah mencukupi karena setiap organisasi mengirimkan perwakilannya dalam setiap forum diskusi.

Pelaksanaan kolaborasi terkait ketersediaan keuangan dalam pengembangan pariwisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang berasal dari APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo yang disusun melalui rencana strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo dan bantuan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berupa Dana Alokasi Khusus (DAK). Selain itu, Pemerintah Daerah juga mendapatkan hasil pemungutan retribusi masuk wisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang yang kemudian pembagian hasilnya untuk pemerataan di seluruh desa di Kabupaten Purworejo dan sebagian menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pembagian hasil dari pendapatan pemungutan retribusi wisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang tidak memiliki kejelasan setelah terdapat pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2012. Sebelumnya pembagian retribusi 30% untuk desa lokasi tempat wisata, 30% untuk seluruh desa di Kabupaten Purworejo dan 40% untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo. Tetapi setelah peraturan daerah tersebut dicabut, pembagian hasil retribusi dan pajak daerah untuk desa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 39 tahun 2019 menjadi 60% untuk seluruh desa di Kabupaten Purworejo dan 40% menjadi

kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Jatimalang dan pokdarwis tidak mendapatkan bagi hasil yang adil untuk menunjang pengembangan pariwisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang.

PENUTUP

A. Kesimpulan

***Collaborative Governance* dalam Pengembangan Pariwisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang**

Implementasi *collaborative governance* dalam pengembangan pariwisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang dilaksanakan dengan cukup baik, Kondisi awal *collaborative governance* didukung oleh potensi wisata yang ada di Pantai Dewa Ruci Jatimalang. Seluruh pemangku kepentingan dalam kolaborasi menyadari bahwa pekerjaan dalam pengembangan pariwisata tidak dapat dilakukan sendiri sehingga membutuhkan kerja sama dari semua pihak yang terlibat. Pihak yang terlibat dalam pengembangan pariwisata Pantai Dewa Ruci adalah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo, Pemerintah Desa Jatimalang, Pokdarwis Dewa Ruci, dan swasta/ pelaku usaha kuliner.

Peran kepemimpinan dalam *collaborative governance* pengembangan pariwisata Pantai Dewa Ruci dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo. Aspek pemecahan masalah dilaksanakan melalui forum diskusi atau musyawarah.. Aspek pemberdayaan atau upaya memberikan bimbingan kepada para pemangku kepentingan sudah dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo berupa pelatihan kebersihan lingkungan, sanitasi, pengelolaan sampah, pelatihan kuliner bagi pelaku usaha kuliner dan pelatihan manajemen pokdarwis.

Desain Kelembagaan untuk penetapan aturan dasar dalam bekerja sama dengan berbagai pihak diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 tahun 2009 dan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2019 tentang Desa Wisata yang menjadi dasar dalam pendampingan dan kerja sama pengembangan pariwisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang. Sementara itu, aturan dasar dalam pengembangan Pariwisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jarak Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo tahun 2021-2026. Akan tetapi, aturan tentang pembagian hasil retribusi pariwisata masih belum jelas.

Proses kolaboratif pada *collaborative governance* pengembangan pariwisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan proses kolaboratif didukung oleh proses dialog tatap muka dalam forum-forum musyawarah formal dan peretemuan informal yang dilaksanakan secara situasional dan kondisional. Proses membangun kepercayaan sudah berjalan cukup baik dengan keterlibatan semua pihak dalam upaya penyelesaian masalah yang dihadapi dan pengembangan kawasan pantai. Hasil sementara yang dapat dilihat dari pengembangan pariwisata di sini adalah adanya pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata. Pembangunan dilakukan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dan dikelola oleh Pokdarwis Dewa Ruci. Hasil sementara yang terlihat dalam kolaborasi pengembangan pariwisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang dapat membantu evaluasi pelaksanaannya sehingga dapat meningkatkan proses-proses di masa yang akan datang.

Kriteria Keberhasilan *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Pariwisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang

Kriteria keberhasilan yang mendukung pelaksanaan *collaborative governance* dalam pengembangan pariwisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang ada lima, yakni (1) *Network structure* dalam pengembangan pariwisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang telah melibatkan berbagai pihak, yakni Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dewa Ruci dan masyarakat pelaku usaha di kawasan Pantai Dewa Ruci Jatimalang. (2) *Trust to the among participants* yang kuat penting karena kepercayaan antar pemangku kepentingan sangat penting dalam proses kolaborasi dalam rangka mencapai tujuan bersama. (3) *Distributive accountability* yang jelas antar pemangku kepentingan karena terdapat pembagian peran dan tanggung jawab dalam pengembangan pariwisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang. (4) *Information sharing* dalam kolaborasi antara pemangku kepentingan sudah saling bertukar informasi atau data, baik dalam forum musyawarah maupun ketika data tersebut dibutuhkan. (5) *aces to resources* mengenai ketersediaan sumber daya manusia dan sumber daya keuangan yang sudah dimiliki, dapat dilanjutkan dengan mengoptimalkan potensi-potensi yang sudah ada.

Terdapat tiga aspek yang bukan merupakan kriteria keberhasilan *collaborative governance* pengembangan pariwisata di Pantai Dewa Ruci Jatimalang, yakni (1) *Commitment to a common purpose* karena kurang kuatnya komitmen para pemangku kepentingan. (2) *Governance* atau kejelasan tata kegiatan promosi yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten

Purworejo masih belum terdapat akun khusus untuk mempromosikan pariwisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang. (3) *Acces to authority* juga bukan merupakan kriteria keberhasilan *collaborative governance* pengembangan pariwisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang karena forum-forum musyawarah atau pertemuan dengan masyarakat yang belum rutin menyebabkan kesulitan bagi masyarakat untuk menyuarkan aspirasi dan keluhannya.

B. Saran

***Collaborative Governance* dalam Pengembangan Pariwisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang**

1. Desain kelembagaan
Diperlukan aturan yang jelas dan tegas untuk mengatur pembagian hasil retribusi masuk pariwisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang.
2. Dialog tatap muka
Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pihak lain yang turut serta dalam pengembangan pariwisata dengan melaksanakan kegiatan *monitoring* dan evaluasi rutin untuk memantau pencapaian tujuan, mengidentifikasi hambatan dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi dalam pengembangan pariwisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang.

Kriteria Keberhasilan *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Pariwisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang

1. *Commitment to a common purpose*
Memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada pelaku pariwisata tentang pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan dan bertanggung jawab kolaborasi pengembangan

pariwisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang dapat dilaksanakan secara optimal.

2. *Governance*

Meningkatkan kegiatan promosi pariwisata dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial yang sudah ada. Diperlukan sosialisasi dan pendampingan dalam pemanfaatan teknologi sebagai media promosi sehingga dapat menciptakan suatu strategi promosi yang kuat dan kreatif untuk menarik minat wisatawan.

3. *Acces to authority*

Meningkatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan melalui forum pengambilan keputusan, forum-forum pertemuan. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi tentang media-media yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk menampung aspirasi dan keluhan-keluhan masyarakat sehingga kekurangan-kekurangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, A. A. (2013). Analisis Dampak Ekonomi Wisata Bahari Terhadap Pendapatan Masyarakat di Pulau Tidung. *Reka Loka*, Vol 1(1).
- Arrozaaq, D. L. C. (2016). *Collaborative governance* (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan Di Kabupaten Sidoarjo) (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Astuti, Retno Sunu, Hardi Warsono, dan Abd. Rachim. (2020). *Collaborative governance* dalam Perspektif Administrasi Publik. Semarang : Program Studi Doktor Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Press.
- Basrowi & Suwandi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta : Rineka Cipta.
- Benedetto, G., Carboni, D., & Corinto, G. L. (2016). *Governance of Sustainable Tourism in a Vast Area Surrounding a National Park. Procedia Environmental Sciences*, 32, 38-48.
- Diani, R. M., & Simbolon, Y. K. G. (2017). Analisis Penerapan *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Pariwisata Bencana *Lava Tour*. In *Forum Ilmu Sosial* (Vol. 44, No. 1, pp. 43-54).
- Geber Pentas Seni Akhir Tahun di Pantai Dewa Ruci Jatimalang. 2022. Diakses pada 25 Januari 2023 melalui <https://purworejo.sorot.co/berita-12328-geber-pentas-seni-akhir-tahun-di-pantai-dewa-ruci-jatimalang.html>
- Hakim, A. R., Zaenuri, M., & Fridayani, H. D. (2019). *Collaborative Governance in Managing Educative Tourism of Jogja Exotarium in Sleman Regency 2019. Journal of Governance and Public Policy*, 6(2), 195-215.
- Hardani, dkk. (2020). Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Yogyakarta : Pustaka Ilmu.
- Hertanto, H. B. (2021, March). Identification analysis of potential object as the basis for the development of karst eco-tourism in western pacitan.

- In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 683, No. 1, p. 012086). IOP Publishing.
- <https://dinporapar.purworejokab.go.id>.
Diakses pada 20 Januari 2023.
- <https://potensiinvestasi.purworejokab.go.id/potensi-sektor-pariwisata>.
Diakses pada 3 April 2023.
- <https://purworejokab.go.id/web/sejarah-kabupaten-purworejo.html>.
Diakses pada 3 April 2023.
- Jaenuddin, M. T. (2019). Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Mamuju. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 67-71.
- Kawengian, F., Lengkong, F. D., & Pombengi, J. D. (2018). Perencanaan Pembangunan Sektor Pariwisata Di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(51).
- Keban, Yeremias T. (2014). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta: Gava Media
- Keyim, P. (2018). *Tourism Collaborative Governance and Rural Community Development in Finland: The Case of Vuonislanti*. *Journal of travel research*, 57(4), 483-494.
- Komunitas Penting untuk Mendorong Pariwisata Purworejo. 2022. Diakses pada 4 Januari 2023 melalui <https://setda.purworejokab.go.id>.
- Kulineran Seafood di Warung Yu War Pantai Jatimalang. Diakses pada 3 Maret 2023 melalui <http://www.berbagifun.com/2021/07/kulineran-seafood-di-warung-yu-war.html>
- Kwiatkowski, G., Hjalager, A. M., Liburd, J., & Saabye Simonsen, P. (2020). *Volunteering and Collaborative Governance Innovation in the Wadden Sea National Park*. *Current Issues in Tourism*, 23(8), 971-989.
- Letak Geografis Kabupaten Purworejo. Diakses pada 20 Januari 2023 melalui <https://purworejokab.go.id>.
- Ma'arif, Samsul. 2022. Pantai Dewaruci Jatimalang, Pantai Populer Berombak Besar Di Purworejo. Diakses pada 25 Januari 2023 melalui <https://www.nativeindonesia.com/pantai-dewaruci-jatimalang>.
- Mashudi, M., & Fauziah, L. (2019, November). Formulasi Pengembangan Destinasi Pariwisata : Tinjauan Strategis dalam Perspektif *Collaborative Governance*. In *Conference on Public Administration and Society* (Vol. 1, No. 01).
- Masyhuri, Aziz, Hartuti Purnaweni, Augustin Rina Herawati, and Budi Puspo Priyadi. (2021). "Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Manajemen Bencana Tanah Longsor Di Kota Semarang." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 4, no. 2 (2021): 854-862.
- Meutia, R., & Rizal, S. (2022). Pengaruh Pengembangan Wisata Bahari terhadap Pendapatan Masyarakat di Pulau Dua Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan. *Jurnal Ilmiah Basis Ekonomi dan Bisnis*, 1(2), 59-78.

- Moleong, L. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Motoh, F. G., Laloma, A., & Londa, V. (2021). Pengembangan Pariwisata di Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(99).
- Muawanah, U., Kurniasari, N., Soejarwo, P. A., & Yuliaty, C. (2020). Peran Kepentingan Stakeholder dan Dukungan Kebijakan dalam Pengembangan Pariwisata Bahari Berbasis Budaya Bahari di Malaumkarta, Kabupaten Sorong. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 10(2), 157-168.
- Mustofa, L. J., & Haryati, T. (2018). Analisis tipologi potensi pariwisata di Provinsi Jawa Tengah. *Economics Development Analysis Journal*, 7(2), 186-193.
- Nawawi, A. (2013). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Wisata Pantai Depok di Desa Kretek Parangtritis. *Jurnal Nasional Pariwisata*, 5(2), 103-109.
- Ningsih, A. S., Purnaweni, H., & Priyadi, B. P. (2022). Strategi Pengembangan Pariwisata Pantai Gandoriah Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat. *Journal of Public Policy and Management Review*, 11(3), 42-61.
- Nugrahani, Farida. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo : Cakra Books.
- Pasolong, Harbani. (2014). *Teori Administrasi Publik*. (Cetakan Keenam). Bandung : Alfabeta.
- Pemerintah Kabupaten Purworejo mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 23 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Purworejo tahun 2013-2028.
- Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo tahun 2021-2026.
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Purworejo.
- Revida, Erika, dkk. (2020). *Teori Administrasi Publik*. Medan : Yayasan Kita Menulis.
- Rif'an, A. A. (2018). Daya Tarik Wisata Pantai Wediombo Sebagai Alternatif Wisata Bahari Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Geografi*, 10(1), 63-73. doi: 10.24114/jg.v10i1.7955.
- Rudin, I. S. (2021). Strategi Pemerintah Desa Tuo Dalam Pengembangan Potensi Wisata Air Terjun Sigerincing Di Desa Tuo Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin (*Doctoral dissertation*, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).
- Saluja, V., Anand, S., Kumar, H., & Peng, J. (2022). The Perceived Impact of Tourism Development and Sustainable Strategies for

- Residents of Varkala, South India. *International Journal of Geoheritage and Parks*, 10(2), 184-195.
- Santoso, R. S., & Djumiarti, T. (2020). *Collaborative governance in Tourism Development at the Protected Area Sangiran Indonesia. In 6th International Conference on Social and Political Sciences (ICOSAPS 2020)* (pp. 351-355). Atlantis Press.
- Sarwidi, S., & Hendrawati, D. (2018). KKN-PPM Optimalisasi Wisata Pantai Jatimalang di Kabupaten Purworejo. *Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 342-350.
- Sayogi, K. W. (2017). Pengembangan Pariwisata Bahari (Studi Deskriptif pada Pelaku Pengembangan Pariwisata Bahari Pantai Watukarung Desa Watukarung Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan).
- Setiawan, B. (2015). Pengembangan Desa Wisata Jatimalang Berbasis Industri Kreatif. *Agrokreatif: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(2), 101-109.
- Setyoputri, S. A., Susilowati, M. D., & Restuti, R. C. (2020). *Tourist preference on the attraction of beach tourism objects in Kebumen Regency, Central Java Province. In E3S Web of Conferences* (Vol. 211, p. 01012). EDP Sciences.
- Silayar, K. (2021). Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Sula. *Jurnal Renaissance*, 6(2), 859-874.
- Sinaga, I. C. (2021). *Collaborative governance in Tourism Development in Indonesia: Study of South Sumatera Province*.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Susanti, A., & Pambudi, A. (2018). Manajemen Objek Wisata Pantai Jatimalang Oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo. *Journal of Public Policy and Administration Research*, 7(6), 723-738.
- Sutiarso, M. A. (2018). Pengembangan Pariwisata Yang Berkelanjutan Melalui Ekowisata.
- Syahputra, K. A., & Ma'ruf, M. F. (2020). *Collaborative governance Dalam Pengelolaan Pariwisata Sektor Pantai (Studi Pada Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Blitar, Perum Perhutani Kabupaten Blitar, Dan Pemerintah Desa Serang Kabupaten Blitar)*. *Publika*, 8(4).
- Tilano, F. A., & Suwitri, S. (2019). *Collaborative governance dalam Upaya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Semarang. Journal Of Public Policy And Management Review*, 8(3), 1-18.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

- Utami, A. D. M., Hariani, D., & Sulandari, S. (2021). *Collaborative governance dalam Pengembangan Desa Wisata Kemetul, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. Journal of Public Policy and Management Review, 10*(3), 281-298.
- Vimastalia, R. M., Hariani, D., & Lestari, H. (2013). Strategi Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Purworejo. *Journal of Public Policy and Management Review, 2*(3), 44-52.
- Wardhani, R. S., & Valeriani, D. (2016). *Green Tourism dalam Pengembangan Pariwisata* Bangka Belitung. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini, 7*(1), 24-29.
- Wisata Budaya Purworejo. Diakses pada 15 April 2023 melalui <https://dinporapar.purworejokab.go.id/index.php/wisata-budaya-purworejo>
- Yovita, F. I., Purwanti, F., & Suprpto, D. (2015). Pengembangan Potensi Wisata Bahari Di Desa Jatimalang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo. *Management of Aquatic Resources Journal (MAQUARES), 4*(3), 99-107.